

Efektivitas BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) Sebagai Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Dalam Mendukung Pembangunan Desa di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo

[Effectiveness of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) as Social Protection and Economic Recovery in Supporting Rural Development in Sumorame Village, Candi Subdistrict, Sidoarjo Regency]

Erlidha Catur Difayanti¹⁾, Isna Fitria Agustina²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to describe and analyze the effectiveness of the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) as a social protection instrument and a strategy for community economic recovery through the government of Desa Sumorame. The findings indicate that BLT-DD implementation is generally effective based on five main indicators. In terms of targeting accuracy, assistance is prioritized for communities with the highest economic vulnerability in accordance with program criteria. Regarding timeliness, distribution is conducted in a structured manner and follows the established schedule. In terms of amount accuracy, assistance is distributed in accordance with national regulations and supports the fulfillment of beneficiaries' basic needs. In achieving program objectives, BLT-DD helps maintain purchasing power, strengthen social resilience, and support local economic stability. From the perspective of beneficiary satisfaction, the program shows a high level of acceptance and provides tangible benefits to recipients. The novelty of this study lies in the comprehensive analysis of BLT-DD effectiveness based on five indicators at the village level and in strengthening its role in social protection and economic recovery. Therefore, BLT-DD distribution reflects adaptive social protection policy implementation and supports sustainable community development.*

Keywords - BLT-DD; Effectiveness; Economic Recovery; Social Protection; Village Development

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai instrumen perlindungan sosial dan strategi pemulihan ekonomi masyarakat melalui Pemerintah Desa Sumorame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BLT-DD berada pada kategori efektif berdasarkan lima indikator utama. Pada ketepatan sasaran, bantuan diprioritaskan kepada masyarakat dengan kerentanan ekonomi tertinggi sesuai kriteria program. Pada ketepatan waktu, penyaluran dilakukan secara terstruktur dan sesuai jadwal. Pada ketepatan jumlah, bantuan disalurkan sesuai regulasi nasional dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar penerima. Pada pencapaian tujuan, BLT-DD berperan dalam menjaga daya beli, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung stabilitas ekonomi lokal. Dari sisi kepuasan penerima, program menunjukkan tingkat penerimaan yang baik dan manfaat nyata bagi masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis efektivitas BLT-DD berbasis lima indikator secara komprehensif pada level desa serta penguatan perannya dalam perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Dengan demikian, penyaluran BLT-DD mencerminkan kebijakan perlindungan sosial yang adaptif dan mendukung pembangunan masyarakat berkelanjutan.*

Kata Kunci - BLT-DD; Efektivitas; Pembangunan Desa; Pemulihan Ekonomi; Perlindungan Sosial

I. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia terus melakukan penguatan kebijakan fiskal berbasis desa melalui pengalokasian Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, Dana Desa tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial yang adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat desa.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan perlindungan sosial berbasis Dana Desa adalah program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program ini menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas sosial

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan tunai kepada masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi. Kebijakan bantuan tunai berbasis Dana Desa juga dinilai mampu memperkuat fungsi jaring pengaman sosial serta mendukung ketahanan ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan daya beli masyarakat[32].

Seiring dengan keberlanjutan implementasi kebijakan Dana Desa, efektivitas program perlindungan sosial berbasis desa menjadi aspek penting untuk dikaji secara akademis. Evaluasi efektivitas diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan mampu mencapai tujuan program, tepat sasaran, tepat waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima. Oleh karena itu, analisis efektivitas penyaluran BLT-DD melalui Pemerintah Desa menjadi penting untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan perlindungan sosial mampu mendukung pembangunan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Secara normatif, keberadaan program BLT-DD memiliki dasar hukum yang kuat. Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 mewajibkan bahwa minimal 40% Dana Desa harus dialokasikan untuk BLT-DD, sebuah ketentuan yang diperkuat oleh Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk perlindungan sosial. Landasan hukum ini berpijak pada amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara partisipatif dan berkelanjutan (Kemendesa, 2020; UU No. 6 Tahun 2014). Dengan demikian, BLT-DD bukan hanya instrumen teknis penyaluran bantuan sosial, melainkan bagian dari kebijakan pembangunan berbasis keadilan sosial di level desa[29].

Pemerintah Desa Sumorame merupakan salah satu wilayah administrasi yang berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data profil desa tahun 2025, jumlah penduduk mencapai sekitar 8.464 jiwa yang sebagian besar bekerja pada sektor informal seperti buruh pabrik, pedagang kecil, serta pelaku usaha mikro rumah tangga. Letak geografis yang berada di kawasan penyangga industri menyebabkan struktur ekonomi masyarakat lebih didominasi oleh sektor non pertanian dan sangat dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi regional. Perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi lapangan pekerjaan sektor industri, serta meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat menyebabkan sebagian rumah tangga berada pada kondisi rentan secara ekonomi. Ketidakstabilan pendapatan pada sektor informal menjadikan sebagian masyarakat memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menuntut adanya peran aktif pemerintah dalam menghadirkan kebijakan perlindungan sosial yang mampu menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung perlindungan sosial masyarakat, Pemerintah Desa Sumorame menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjaga daya beli serta memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Hingga tahun 2025, BLT-DD masih menjadi salah satu program prioritas dalam mendukung stabilitas ekonomi masyarakat serta memperkuat peran pemerintah desa dalam mewujudkan keadilan sosial dan ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Sumorame, jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rincian penyaluran bantuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel.1 Data BLT-DD Pemerintah Desa Sumorame (2021–2025)

No.	Tahun	Jumlah KPM	Bantuan Per KPM per Bulan	Lama Penerimaan	Total Dana Disalurkan
1.	2021	56	Rp. 300.000	12 Bulan	Rp201.600.000
2.	2022	74	Rp. 300.000	12 Bulan	Rp266.400.000
3.	2023	50	Rp. 300.000	12 Bulan	Rp180.000.000
4.	2024	50	Rp. 300.000	12 Bulan	Rp180.000.000
5.	2025	50	Rp. 300.000	12 Bulan	Rp180.000.000

Sumber: Pemerintah Desa Sumorame

Berdasarkan Tabel.1 penyaluran BLT-DD Pemerintah Desa Sumorame tahun 2021–2025, terlihat adanya perubahan signifikan baik dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun total dana yang dialokasikan. Pada tahun 2021, jumlah penerima tercatat sebanyak 56 KPM dengan total dana sebesar Rp201.600.000. Jika dihitung, setiap KPM menerima Rp300.000 per bulan selama 12 bulan, sehingga total penerimaan tahunan per keluarga mencapai Rp3.600.000. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah penerima menjadi 74 KPM. Peningkatan sebesar 32,14% dibanding tahun sebelumnya ini otomatis berdampak pada bertambahnya alokasi anggaran menjadi Rp266.400.000. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat lebih banyak keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Namun, sejak tahun 2023 hingga 2025 tren penyaluran mengalami penurunan. Jumlah penerima menurun drastis menjadi 50 KPM, atau berkurang 32,43% dari tahun 2022. Penurunan ini diikuti

dengan penyesuaian total dana menjadi Rp180.000.000 per tahun, yang tetap konsisten hingga 2025. Meskipun jumlah penerima menurun, besaran bantuan per KPM tidak berubah, yakni Rp300.000 per bulan.

Berdasarkan data penurunan jumlah penerima BLT-DD Pemerintah Desa Sumorame, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi dinamika tersebut. Pertama, adanya proses validasi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan secara berkala. Hal ini penting karena ketidakakuratan data seringkali menyebabkan salah sasaran, sehingga pembaruan data perlu dilakukan secara rutin[8]. Kedua, regulasi pemerintah pusat yang membatasi maksimal 25% Dana Desa untuk BLT-DD mulai tahun 2023 juga turut menekan jumlah penerima bantuan[9]. Ketiga, kondisi sosial-ekonomi masyarakat pasca pandemi yang mulai membaik menyebabkan berkurangnya jumlah keluarga miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Wulandari dan Suryani (2022) menegaskan bahwa pendataan dan penetapan calon penerima BLT-DD sangat menentukan jumlah KPM dari tahun ke tahun. Selain itu, Safitri dan Pradana (2022) menemukan bahwa meskipun BLT-DD efektif membantu warga miskin, kriteria penerima seringkali berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi.

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Pemerintah Desa Sumorame masih menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan anggaran dan kuota penerima menyebabkan tidak seluruh keluarga miskin dapat terakomodasi sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu, penyaluran bantuan yang dilakukan secara triwulanan serta adanya keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat membuat bantuan tidak selalu diterima secara rutin setiap bulan. Besaran bantuan yang relatif kecil dibandingkan dengan meningkatnya kebutuhan hidup juga menyebabkan bantuan hanya mampu menjadi penunjang kebutuhan dasar dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan rumah tangga penerima manfaat. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana efektivitas penyaluran BLT-DD di Pemerintah Desa Sumorame agar dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan serta tantangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Siagian (2001) sebagai dasar analisis untuk mengevaluasi pelaksanaan program BLT-DD di tingkat desa. Menurut Siagian, efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu organisasi atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Efektivitas ini dapat diukur melalui lima indikator utama, yaitu: (1) ketepatan sasaran; (2) ketepatan waktu; (3) ketepatan jumlah; (4) pencapaian tujuan; dan (5) kepuasan penerima[12].

Indikator efektivitas BLT-DD dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, ketepatan sasaran berkaitan dengan sejauh mana bantuan menjangkau keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan, karena kesalahan sasaran tidak hanya mengurangi manfaat tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial[21]. Kedua, ketepatan waktu menekankan pentingnya penyaluran sesuai jadwal, sebab keterlambatan, terutama pada masa krisis, akan langsung mengurangi manfaat bantuan[11]. Ketiga, ketepatan jumlah menilai kesesuaian besaran bantuan dengan ketentuan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat; jika jumlahnya terlalu kecil, maka dampaknya terhadap kesejahteraan juga terbatas[13].

Selanjutnya, pencapaian tujuan dilihat dari sejauh mana program mampu menjaga daya beli, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung pemulihan ekonomi desa[14]. Terakhir, kepuasan penerima berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap keadilan, transparansi, kemudahan akses, serta manfaat nyata dari BLT-DD. Menurut Mardiasmo (2006), kepuasan masyarakat merupakan indikator penting efektivitas karena memengaruhi legitimasi pemerintah sekaligus keberlanjutan program.

Penelitian ini didukung oleh beberapa kajian sebelumnya yang relevan dengan topik efektivitas penyaluran BLT-DD dan pembangunan desa. Penelitian terdahulu oleh Dyas dan Agustina (2023) tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Pemerintah Desa Sugihwaras menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan sosial di tingkat desa sangat bergantung pada peran aktif aparat desa dalam perencanaan, pendataan, dan koordinasi dengan penerima manfaat. Studi tersebut menemukan bahwa prosedur pelaksanaan program berjalan dengan baik, namun masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi dan keterbatasan sumber daya. Temuan ini menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran BLT-DD di Pemerintah Desa Sumorame, dengan fokus pada ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan dampak nyata terhadap penerima manfaat.

Kedua, studi oleh Sari dan Hidayat (2021) menyimpulkan bahwa efektivitas penyaluran BLT-DD selama pandemi masih menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek ketepatan sasaran. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa masih banyak bantuan yang diterima oleh rumah tangga yang tidak masuk dalam kategori miskin atau terdampak, akibat data kependudukan yang tidak diperbarui dan minimnya partisipasi warga dalam proses verifikasi. Ketiga, Wahyuni (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan BLT-DD di Masa Pandemi menemukan bahwa kendala teknis seperti kurangnya pelatihan bagi perangkat desa serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses distribusi menyebabkan BLT-DD kurang tepat jumlah dan waktu. Ia menyarankan perlunya pelatihan administrasi dan pemanfaatan sistem digital agar program dapat berjalan lebih efektif dan transparan. Keempat, penelitian oleh Mulyani (2023) menambahkan dimensi kepuasan penerima sebagai indikator penting dalam mengevaluasi program bantuan. Dalam studinya, ia menemukan bahwa walaupun secara teknis bantuan telah tersalurkan, ketidakpuasan penerima terhadap proses distribusi dan transparansi pengelolaan dapat menurunkan

legitimasi program di mata publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya aspek persepsi masyarakat dalam menilai keberhasilan program.

Dan terakhir Penelitian oleh Safitri dan Pradana (2022) meneliti efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi keluarga penerima manfaat di Desa Turi, Kabupaten Magetan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT-DD memiliki peran signifikan dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat penerima. Meskipun demikian, penyaluran program ini juga menghadapi beberapa kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima dan hambatan dalam proses administrasi, yang dapat memengaruhi tingkat kepuasan penerima. Temuan ini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan BLT-DD, baik dari sisi teknis penyaluran maupun persepsi masyarakat, agar program dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi keluarga miskin. Berdasarkan kajian-kajian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang signifikan dalam memperkaya literatur terkait efektivitas penyaluran bantuan sosial berbasis Dana Desa. Penelitian ini mengadopsi indikator efektivitas organisasi menurut Siagian (2001) yang mencakup lima aspek utama, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah, pencapaian tujuan, dan kepuasan penerima manfaat. Seluruh indikator tersebut digunakan untuk mengevaluasi secara komprehensif dinamika penyaluran BLT-DD di Pemerintah Desa Sumorame dalam rentang waktu lima tahun (2021–2025) secara longitudinal.

Dengan ruang lingkup tersebut, penelitian ini yang berjudul “Efektivitas Penyaluran BLT-DD sebagai Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi dalam Mendukung Pembangunan Desa di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo” diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan empiris dalam mengevaluasi kebijakan perlindungan sosial di tingkat desa, serta menjadi referensi dalam penguatan tata kelola pembangunan desa berbasis keadilan sosial.

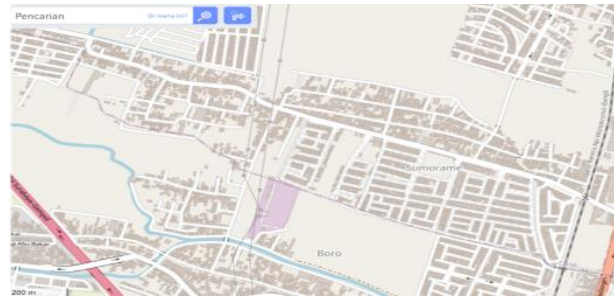
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame berdasarkan lima indikator utama menurut Siagian (2001), yaitu ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu, ketepatan jumlah, pencapaian tujuan program, serta tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran BLT-DD sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus strategi pemulihan ekonomi desa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena dinilai mampu memahami secara mendalam dinamika penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dari perspektif pelaksana dan penerima manfaat[26]. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di Pemerintah Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, karena desa tersebut menunjukkan variasi tren penyaluran BLT-DD selama periode 2021–2025. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi desa, arsip penyaluran bantuan, dan regulasi terkait Dana Desa. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pelaksanaan program BLT-DD[8]. Informan meliputi perangkat desa yakni Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kasi Kesejahteraan yang terlibat dalam pendataan dan penyaluran bantuan serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima BLT-DD minimal dua tahun berturut-turut. Pengumpulan data dilakukan hingga mencapai titik jenuh, yaitu ketika informasi yang diperoleh tidak lagi menghasilkan temuan baru. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi empat Langkah yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan[13]. Data yang diperoleh diseleksi, difokuskan pada informasi yang relevan, disajikan dalam bentuk narasi, kutipan wawancara, dan tabel, kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan yang valid mengenai efektivitas pelaksanaan program BLT-DD di Pemerintah Desa Sumorame.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Sumorame merupakan salah satu desa di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang memiliki luas wilayah sekitar 113,98 hektar dan terbagi ke dalam 2 dusun, 17 RW, serta 43 RT[5]. Berdasarkan data perencanaan desa, jumlah penduduk Pemerintah Desa Sumorame mencapai 8.464 jiwa yang terdiri dari 4.207 laki-laki dan 4.256 perempuan, dengan total 2.834 kepala keluarga [6].



Gambar 1. Peta Pemerintah Desa Sumorame
Sumber: Website resmi Pemerintah Desa Sumorame

Pemerintah Desa Sumorame memperoleh alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta program perlindungan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) (Kemendesa PDTT, 2020). Program BLT-DD di Pemerintah Desa Sumorame mulai disalurkan sejak tahun 2020 sebagai respon terhadap pandemi. Seperti dijelaskan oleh Sari dan Hidayat (2021), BLT-DD merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat desa yang terdampak pandemi. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Suharto (2009) bahwa perlindungan sosial dalam bentuk bantuan tunai diperlukan untuk mengurangi kerentanan masyarakat miskin di masa krisis.

Penelitian menganalisis efektivitas penyaluran BLT-DD di Pemerintah Desa Sumorame berdasarkan lima indikator efektivitas menurut Siagian (2001), yaitu ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah, pencapaian tujuan, dan kepuasan penerima manfaat.

A. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan salah satu indikator utama efektivitas menurut Siagian (2001) yang berkaitan dengan kemampuan sebuah program dalam menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dalam konteks kebijakan sosial, tepat sasaran berarti bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh keluarga miskin dan rentan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Ketepatan ini sangat menentukan keberhasilan suatu program, sebab apabila bantuan tidak sesuai sasaran, maka tujuan program tidak tercapai dan justru berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial maupun konflik horizontal di tengah masyarakat [19].

Dalam konteks BLT-DD, dasar hukum penyaluran diatur melalui Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020, dengan kriteria penerima yaitu: (1) keluarga miskin non-PKH dan non-BPNT, (2) kehilangan mata pencaharian, (3) tidak menerima bantuan sosial lain, (4) memiliki anggota keluarga rentan sakit kronis, serta (5) terdaftar dalam DTKS dengan prioritas keluarga yang paling miskin. Kriteria ini menjadi acuan dalam menilai apakah penyaluran BLT-DD di Pemerintah Desa Sumorame telah tepat sasaran. Berdasarkan data Pemerintah Desa Sumorame, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD dari 2021–2025 selalu lebih sedikit dibandingkan jumlah keluarga miskin dalam DTKS, sebagaimana terlihat pada data berikut.

Tabel 2. Perbandingan Jumlah KPM dengan Warga Miskin (DTKS)

Tahun	Jumlah Warga Miskin (DTKS)	Jumlah KPM	Presentase KPM terhadap DTKS (%)
2021	120	56	46,6%
2022	118	74	62,7%
2023	115	50	43,5%
2024	110	50	45,5%
2025	108	50	46,3%

Sumber: Pemerintah Desa Sumorame

Berdasarkan data Pemerintah Desa Sumorame, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD dari tahun 2021–2025 memang lebih kecil dibandingkan jumlah keluarga miskin yang tercatat dalam DTKS, sebagaimana terlihat pada Tabel 2. Namun, selisih antara jumlah keluarga miskin dalam DTKS dengan jumlah penerima BLT-DD tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa keluarga tersebut tidak memperoleh bantuan sosial. Sebagian keluarga yang tidak menerima BLT-DD telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun program bantuan sosial lain yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan data DTKS.

Hal ini sejalan dengan ketentuan kebijakan BLT-DD yang memprioritaskan keluarga miskin yang belum menerima bantuan sosial lainnya, sehingga terjadi pembagian peran antarprogram bantuan sosial agar penyaluran

bantuan lebih merata dan tidak terjadi penerimaan ganda dalam satu jenis bantuan sosial. Dengan demikian, selisih jumlah antara DTKS dan KPM BLT-DD lebih mencerminkan mekanisme integrasi program perlindungan sosial dibandingkan menunjukkan ketidaktercapaian sasaran program.

Pada tahun 2021, dari 120 keluarga miskin terdapat 56 keluarga yang menerima BLT-DD atau sekitar 46,6%. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian keluarga miskin telah terakomodasi melalui program BLT-DD, sementara sebagian lainnya memperoleh bantuan sosial melalui program lain sesuai dengan hasil verifikasi dan integrasi data DTKS. Pada tahun 2022, cakupan meningkat menjadi 74 keluarga dari 118 keluarga miskin atau sebesar 62,7%. Kondisi ini menunjukkan adanya optimalisasi penyaluran BLT-DD sehingga lebih banyak keluarga rentan dapat terakomodasi dalam program bantuan sosial berbasis Dana Desa. Pada tahun 2023–2025, jumlah penerima BLT-DD relatif stabil pada angka 50 keluarga. Kondisi ini tidak sepenuhnya menunjukkan penurunan efektivitas program, melainkan lebih menggambarkan adanya penyesuaian kebijakan alokasi anggaran serta mekanisme distribusi bantuan sosial agar tetap menjangkau kelompok masyarakat yang belum menerima bantuan sosial lainnya.

Berdasarkan regulasi dalam Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020, penerima BLT-DD diprioritaskan bagi keluarga miskin yang belum menerima bantuan sosial lain seperti PKH maupun BPNT. Analisis data di Pemerintah Desa Sumorame menunjukkan bahwa sebagian besar KPM BLT-DD telah sesuai dengan kriteria tersebut. Pemerintah desa melalui mekanisme musyawarah desa melakukan verifikasi untuk memastikan bantuan diberikan kepada keluarga dengan tingkat kerentanan ekonomi paling tinggi.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Kasi Kesejahteraan Pemerintah Desa Sumorame dalam wawancara: *“Setiap tahun kami usulkan berdasarkan DTKS, tapi tidak bisa semua keluarga miskin menerima karena kuota terbatas. Jadi dalam musyawarah desa dipilih yang paling membutuhkan, seperti janda miskin, lansia, atau pekerja harian yang kehilangan mata pencaharian.”* (Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan, 12 September 2025). Pernyataan ini memperkuat bahwa ketepatan sasaran sudah diperhatikan, tetapi keterbatasan kuota membuat pemerintah desa harus melakukan prioritisasi.

Ketepatan sasaran BLT-DD di Pemerintah Desa Sumorame telah diupayakan melalui mekanisme prioritisasi berdasarkan tingkat kerentanan ekonomi masyarakat. Keterbatasan anggaran, terutama sejak pembatasan maksimal alokasi Dana Desa untuk BLT-DD, menyebabkan jumlah penerima harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal desa sehingga bantuan difokuskan pada kelompok paling rentan. Meskipun tidak seluruh keluarga miskin menerima BLT-DD, kondisi ini lebih dipengaruhi keterbatasan kuota, bukan kesalahan penetapan sasaran, meskipun dalam praktiknya dapat menimbulkan persepsi kecemburuan sosial di masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sari & Hidayat (2021) yang menjelaskan bahwa program bantuan sosial di tingkat desa sering menghadapi masalah exclusion error akibat keterbatasan anggaran dan kelemahan basis data. Kondisi tersebut juga tercermin di Pemerintah Desa Sumorame, di mana sebagian keluarga miskin tidak terakomodasi meskipun memenuhi kriteria penerima BLT-DD. Dengan demikian, ketepatan sasaran BLT-DD di Desa Sumorame dapat dikategorikan cukup baik tetapi belum optimal, sebab tujuan utama program sebagai instrumen perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat miskin belum sepenuhnya tercapai.

B. Ketepatan Waktu

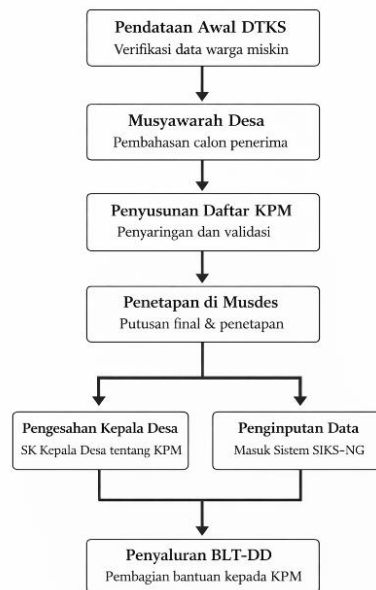
Menurut Siagian (2001), ketepatan waktu mencerminkan sejauh mana kegiatan atau program dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam merencanakan, mengatur, dan melaksanakan setiap tahapan kegiatan agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat memengaruhi hasil yang diharapkan. Siagian (2001) menekankan bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau program yang dijalankan. Oleh karena itu, pengelolaan waktu yang baik menjadi indikator utama efektivitas karena mencerminkan profesionalisme dan komitmen pihak penyelenggara.



Gambar 2. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) BLT-DD
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dalam pelaksanaan BLT-DD di Pemerintah Desa Sumorame, mekanisme pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan secara sistematis untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Mekanisme Pendataan dan Penetapan Penerima
BLT-DD di Desa Sumorame



Sumber: Pemerintah Desa Sumorame

Data tersebut menunjukkan mekanisme pendataan hingga penetapan penerima BLT-DD yang dilaksanakan secara sistematis dan berjenjang di Pemerintah Desa Sumorame. Proses dimulai dari pendataan awal berbasis DTKS melalui verifikasi data warga miskin. Selanjutnya dilakukan musyawarah desa untuk membahas calon penerima bantuan berdasarkan tingkat kerentanan ekonomi masyarakat. Hasil musyawarah kemudian digunakan dalam penyusunan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui proses penyaringan dan validasi data.

Tahap berikutnya adalah penetapan penerima dalam Musyawarah Desa (Musdes) sebagai keputusan final. Setelah ditetapkan, data penerima disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa dan diinput ke dalam sistem SIKS-NG sebagai bagian dari integrasi data bantuan sosial nasional. Tahap akhir adalah penyaluran BLT-DD kepada KPM sesuai dengan daftar yang telah ditetapkan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD dilaksanakan secara administratif, transparan, dan berorientasi pada ketepatan sasaran.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan warga penerima BLT-DD di Desa Sumorame, beliau menjelaskan *"Saya sudah beberapa kali menerima BLT dari desa. Awalnya kami didata oleh ketua RT/RW setempat, lalu diberi pengarahan mengenai mekanisme penyaluran. Beberapa waktu kemudian kami menerima undangan untuk mengambil BLT di balai desa, lengkap dengan jam pengambilan dan berkas yang harus dibawa. Menurut saya, alur pendataan dan penyaluran BLT ini cukup jelas dan sudah sangat baik."* Selain wawancara di atas, peneliti juga melakukan observasi dan diskusi ringan dengan beberapa warga lainnya. Mayoritas memberikan pernyataan yang sejalan bahwa mekanisme dan alur pendataan hingga penyaluran BLT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga penerima BLT, dapat dianalisis bahwa penyaluran BLT di desa ini relatif tepat waktu. Setiap tahap penyaluran telah direncanakan sejak awal tahun dan dibagi secara berkala agar masyarakat menerima bantuan sesuai jadwal. Kendala yang muncul, seperti keterlambatan pencairan dana dari tingkat kecamatan, hanya bersifat sporadis dan tidak memengaruhi sebagian besar jadwal penyaluran. Dari perspektif warga, mekanisme penyaluran yang jelas, termasuk pendataan oleh RT/RW dan pemberian undangan dengan waktu dan berkas yang harus dibawa, menunjukkan bahwa alur kegiatan berjalan sesuai rencana dan mudah dipahami masyarakat. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa desa mampu mengelola kegiatan secara efektif, sehingga ketepatan waktu sebagai indikator efektivitas program dapat dikatakan tercapai dengan baik.

Penelitian Wahyuni (2022) menunjukkan beberapa faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyaluran BLT-DD. Pertama, kurangnya pelatihan bagi perangkat desa berdampak pada ketidakpastian dalam proses administrasi, sehingga penyaluran terkadang tertunda. Kedua, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pendataan dan distribusi menyebabkan proses manual memakan waktu lebih lama dan rawan kesalahan. Ketiga, kendala eksternal seperti pencairan dana yang lambat dari pemerintah pusat atau kabupaten menambah risiko keterlambatan. Wahyuni menyarankan agar perangkat desa mendapatkan pelatihan administrasi dan pemanfaatan sistem digital agar penyaluran BLT-DD lebih tepat waktu, efisien, dan transparan.

Dibandingkan dengan temuan Wahyuni (2022), Pemerintah Desa Sumorame menunjukkan kondisi yang lebih baik. Meskipun ada keterlambatan kecil akibat pencairan dana dari kecamatan, perencanaan yang matang, pembagian tahap penyaluran, serta koordinasi perangkat desa dengan RT/RW dan masyarakat membuat penyaluran tetap berjalan sesuai jadwal. Mekanisme ini menunjukkan implementasi sebagian rekomendasi Wahyuni, terutama dalam hal manajemen internal dan koordinasi antar perangkat desa, meskipun pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses masih dapat ditingkatkan.

C. Ketepatan Jumlah

Siagian (2001) menegaskan bahwa efektivitas program dapat dilihat dari kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, termasuk dalam hal jumlah bantuan yang disalurkan. Senada dengan itu, Makmur (2015) menjelaskan bahwa jumlah yang tepat berarti tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Berdasarkan data penyaluran BLT-DD Desa Sumorame tahun 2021–2025, besaran bantuan yang diterima setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercatat sama, yaitu Rp300.000 per bulan atau setara dengan Rp3.600.000 dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi jumlah nominal, pemerintah desa telah menyalurkan bantuan sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku, tanpa adanya perbedaan antar tahun maupun antar penerima (Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021; Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020).



Gambar 3. Proses penerimaan BLT-DD di Pemerintah Desa Sumorame 2025

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada gambar diatas disajikan dokumentasi proses penerimaan BLT-DD oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dokumentasi tersebut menjadi bukti empiris bahwa penyaluran bantuan dilaksanakan secara langsung kepada penerima melalui mekanisme penyaluran resmi yang dilengkapi dengan administrasi pendukung, seperti undangan penyaluran, daftar hadir, serta bukti tanda terima bantuan. Keberadaan dokumentasi ini memperkuat bahwa bantuan yang disalurkan telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan serta mencerminkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BLT-DD.

Penyaluran BLT-DD di Pemerintah Desa Sumorame ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai ketentuan regulasi. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, penyaluran bantuan tidak dilakukan setiap bulan, melainkan dibagikan secara triwulanan. Dengan mekanisme tersebut, setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp900.000 dalam satu kali penyaluran yang merupakan akumulasi dari tiga bulan bantuan. Mekanisme penyaluran triwulanan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan pengelolaan administrasi dan efisiensi proses penyaluran bantuan di tingkat pemerintah desa. Meskipun disalurkan secara triwulan, jumlah bantuan yang diterima KPM tetap sesuai dengan ketentuan nominal bantuan bulanan yang telah ditetapkan, sehingga tidak mengurangi hak penerima bantuan dan tetap memenuhi prinsip ketepatan jumlah dalam pelaksanaan program BLT-DD.

Hasil wawancara dengan perangkat desa menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasi Kesejahteraan Desa menjelaskan bahwa setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan, tanpa ada pengurangan nominal dari tahun ke tahun. Ia menegaskan, “Jumlah yang kami salurkan sesuai aturan pemerintah, jadi setiap keluarga penerima tetap menerima Rp300 ribu per bulan selama satu tahun. Tidak ada pengurangan atau perbedaan antar penerima, semuanya sama rata.” (Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa, 15 September 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi teknis, pemerintah desa berupaya menjaga konsistensi jumlah bantuan agar sesuai dengan regulasi nasional.

Sementara itu, pandangan warga penerima menunjukkan respon yang positif terhadap mekanisme penyaluran bantuan yang dibagikan secara triwulanan. Meskipun secara ketentuan bantuan ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan, dalam pelaksanaannya warga menerima bantuan sebesar Rp900.000 dalam satu kali penyaluran untuk periode

tiga bulan. Beberapa warga menyatakan bahwa nominal tersebut cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya untuk membeli kebutuhan pokok rumah tangga.

Salah satu warga menyampaikan, “Biasanya kami menerima bantuan Rp900 ribu sekali ambil. Uangnya langsung dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti beli beras, minyak, dan kebutuhan dapur lainnya.” (Wawancara dengan warga penerima BLT-DD di Desa Sumorame, 17 September 2025).

Namun, sebagian warga lainnya merasa jumlah bantuan tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan. Seorang penerima lain mengungkapkan, “Kalau buat tambahan memang terasa, tapi kalau dibilang cukup untuk kebutuhan sebulan ya masih kurang. Untuk listrik, sekolah anak, dan kebutuhan lain uang segitu jelas tidak cukup.” (Wawancara dengan warga penerima BLT-DD, 17 September 2025).

Temuan lapangan ini memperlihatkan bahwa meskipun jumlah bantuan telah tepat secara aturan dan konsisten setiap tahun, persepsi masyarakat berbeda-beda. Ada warga yang menilai bantuan cukup karena sifatnya rutin dan pasti, tetapi ada juga yang menilai jumlah tersebut kurang besar dibandingkan dengan kebutuhan dasar keluarga miskin. Hal ini memperkuat pandangan bahwa ketepatan jumlah pada BLT-DD lebih tercapai pada aspek administratif, sementara dari sisi substantif masih menyisakan tantangan dalam memberikan perlindungan sosial yang memadai bagi rumah tangga rentan. Temuan penelitian ini didukung oleh studi Safitri dan Pradana (2022), yang menjelaskan bahwa meskipun jumlah bantuan BLT-DD telah membantu meringankan beban masyarakat miskin, nilai nominalnya masih terbatas dan belum mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi rumah tangga secara menyeluruh. Kondisi serupa terlihat di Pemerintah Desa Sumorame, di mana sebagian warga penerima menilai bantuan Rp300.000 per bulan sangat membantu, tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti biaya pendidikan, listrik, maupun kebutuhan pokok sehari-hari.

D. Pencapaian Tujuan

Menurut Sondang P. Siagian (2001), efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan program ini adalah menjaga daya beli masyarakat miskin, mengurangi kerentanan sosial akibat guncangan ekonomi, serta mendukung pemulihan ekonomi desa pasca pandemi. Oleh karena itu, pencapaian tujuan BLT-DD dapat dilihat dari kemampuan bantuan tunai dalam meringankan beban rumah tangga miskin, menjaga stabilitas sosial, dan mendukung keberlangsungan ekonomi desa.

Pencapaian tujuan program BLT-DD di Desa Sumorame dapat dilihat melalui keterkaitan antara indikator ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan penyaluran bantuan. Ketepatan sasaran menunjukkan bahwa bantuan diprioritaskan kepada keluarga dengan tingkat kerentanan ekonomi tertinggi berdasarkan DTKS dan hasil musyawarah desa. Ketepatan jumlah tercermin dari kesesuaian antara kuota penerima dengan jumlah bantuan yang diterima oleh KPM. Sementara itu, ketepatan waktu terlihat dari pelaksanaan penyaluran bantuan yang dilakukan sesuai jadwal penyaluran yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk pencapaian tujuan program BLT-DD dapat dilihat dari kesesuaian antara kuota penerima yang telah ditetapkan dengan realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan setiap tahunnya. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa bantuan telah disalurkan sesuai dengan target penerima yang direncanakan.

Tabel 3. Kuota dan Realisasi Penerima BLT-DD

Tahun	Kuota BLT-DD	Jumlah KPM
2021	56	56
2022	74	74
2023	50	50
2024	50	50
2025	50	50

Sumber: Pemerintah Desa Sumorame

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah penerima BLT-DD setiap tahun telah sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 hingga 2025 tidak terdapat selisih antara jumlah kuota dan jumlah realisasi penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima telah berjalan secara optimal sehingga bantuan dapat disalurkan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Kuota BLT-DD yang ditetapkan setiap tahunnya di Desa Sumorame berasal dari hasil proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa yang mengacu pada ketentuan regulasi nasional terkait prioritas penggunaan Dana Desa. Penetapan kuota dilakukan melalui tahapan analisis data DTKS, kemampuan anggaran Dana Desa, serta hasil musyawarah desa yang mempertimbangkan tingkat kerentanan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, jumlah kuota BLT-DD tidak semata-mata ditentukan berdasarkan jumlah keluarga miskin, tetapi juga disesuaikan dengan alokasi maksimal Dana Desa yang dapat digunakan untuk program BLT-DD sesuai kebijakan yang berlaku. Kesesuaian antara kuota dan realisasi penerima juga menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu mengelola penyaluran bantuan secara terencana dan terkontrol. Dengan tidak adanya selisih antara target dan realisasi penerima, maka bantuan dapat diterima secara penuh oleh kelompok sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dyas & Agustina (2023) yang menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan sosial dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan program, penetapan target penerima, serta realisasi pelaksanaan program di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, pencapaian tujuan BLT-DD tercermin dari terpenuhinya indikator ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan penyaluran bantuan. Meskipun demikian, program BLT-DD lebih berperan sebagai instrumen perlindungan sosial jangka pendek dalam membantu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat miskin, sehingga keberhasilannya lebih terlihat pada aspek stabilisasi ekonomi dibandingkan sebagai solusi permanen dalam mengatasi kemiskinan.

E. Kepuasan Penerima Manfaat

Menurut Siagian (2001), efektivitas suatu program dapat diukur dari tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan harapan masyarakat sebagai sasaran utama. Dengan kata lain, sebuah program dianggap efektif apabila manfaat yang diberikan benar-benar dirasakan oleh penerimanya. Dalam konteks Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), kepuasan penerima menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan apakah tujuan program telah tercapai. Tingkat kepuasan ini tercermin dari bagaimana masyarakat menilai bantuan yang diterima, apakah sudah cukup membantu kebutuhan sehari-hari mereka atau justru masih dirasa kurang dibandingkan dengan beban ekonomi yang dihadapi.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Pemerintah Desa Sumorame, disampaikan bahwa program BLT-DD memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat. Beliau menyatakan *“Pelaksanaan BLT-DD di Desa Sumorame sejauh ini berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Bantuan ini cukup membantu masyarakat, terutama bagi warga yang pendapatannya menurun. Sebagian besar penerima bantuan juga menyampaikan rasa syukur karena bantuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun jumlah bantuannya masih terbatas.”* Wawancara tersebut menunjukkan bahwa program BLT-DD dinilai cukup berhasil membantu masyarakat di Pemerintah Desa Sumorame. Perangkat desa menyebutkan bahwa penyaluran berjalan lancar, masyarakat penerima umumnya merasa terbantu, dan sebagian besar menunjukkan rasa syukur meskipun nominal bantuan relatif terbatas.

Pandangan masyarakat penerima memperlihatkan respon yang beragam. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa penerima manfaat BLT Dana Desa di Pemerintah Desa Sumorame, sebagian warga menyatakan merasa puas terhadap bantuan yang diberikan karena dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Seorang penerima manfaat menyampaikan, *“Bantuan BLT-DD sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Uangnya biasanya saya pakai untuk beli beras, minyak goreng, dan kebutuhan dapur lainnya. Apalagi kalau harga sembako naik, bantuan ini sangat terasa manfaatnya.”*

Penerima lainnya juga menyampaikan hal serupa, *“Rp300 ribu itu cukup menolong untuk kebutuhan dasar. Walaupun tidak banyak, tapi sangat membantu, apalagi kalau sedang tidak ada pemasukan tetap.”* Selain itu, penerima manfaat lainnya mengungkapkan kepuasan terhadap keberlanjutan program bantuan tersebut, *“Saya merasa terbantu karena bantuan ini rutin diberikan. Jadi bisa membantu meringankan pengeluaran rumah tangga setiap bulannya.”* Namun demikian, terdapat pula pandangan bahwa jumlah bantuan masih dirasa belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga, terutama untuk kebutuhan non-pangan seperti listrik, pendidikan anak, dan kebutuhan bulanan lainnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mulyani (2023) yang menekankan bahwa kepuasan penerima merupakan dimensi penting dalam evaluasi program bantuan, karena persepsi masyarakat terhadap distribusi dan transparansi pengelolaan dapat memengaruhi legitimasi program. Perbedaan terlihat pada tingkat kepuasan, di mana sebagian penerima BLT-DD merasa terbantu dan bersyukur, namun masih terdapat harapan agar jumlah bantuan lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi keluarga.

Analisis ini menegaskan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh terselurnya bantuan, tetapi juga oleh persepsi penerima terkait kuantitas, kualitas distribusi, dan transparansi, sehingga evaluasi kepuasan penerima harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut untuk memastikan program benar-benar memenuhi tujuan yang diharapkan.

IV. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Pemerintah Desa Sumorame secara umum telah berjalan efektif jika dilihat berdasarkan lima indikator penilaian. Pada indikator ketepatan sasaran, proses pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima manfaat yang dilakukan melalui musyawarah desa mampu mengarahkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar berada pada kondisi ekonomi rentan. Bantuan diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kebutuhan paling tinggi sehingga program BLT-DD dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Meskipun demikian, keterbatasan kuota penerima menyebabkan tidak seluruh keluarga miskin dapat menerima bantuan, sehingga masih terdapat potensi kecemburuan sosial di masyarakat.

Pada indikator ketepatan jumlah, bantuan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disalurkan secara utuh kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat. Konsistensi jumlah bantuan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan program sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Bantuan tersebut terbukti mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, dari sisi pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara menyeluruh, jumlah bantuan masih dirasakan terbatas sehingga hanya berfungsi sebagai bantuan tambahan, bukan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan utama masyarakat.

Pada indikator ketepatan waktu, penyaluran BLT-DD di Pemerintah Desa Sumorame secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Mekanisme penyaluran yang dilakukan secara terstruktur serta adanya koordinasi antara perangkat desa dan masyarakat mendukung kelancaran proses distribusi bantuan. Walaupun masih ditemukan keterlambatan pada beberapa periode akibat faktor administratif dan proses pencairan dana, kondisi tersebut tidak berlangsung secara signifikan dan tidak menghambat pelaksanaan program secara keseluruhan.

Selanjutnya, pada indikator pencapaian tujuan, program BLT-DD terbukti memberikan kontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat, membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat, serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Keberadaan bantuan tunai secara rutin juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat desa, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tidak tetap. Program BLT-DD berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang mampu mengurangi dampak tekanan ekonomi yang dialami masyarakat.

Pada indikator kepuasan penerima manfaat, mayoritas masyarakat penerima BLT-DD menunjukkan tingkat penerimaan yang baik terhadap program tersebut. Bantuan dinilai memberikan manfaat nyata dan membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Selain itu, mekanisme penyaluran yang jelas dan transparan turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Meskipun demikian, sebagian penerima masih berharap adanya peningkatan nominal bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara lebih menyeluruh, terutama untuk kebutuhan non pangan seperti pendidikan, listrik, dan kebutuhan bulanan lainnya.

Secara keseluruhan, program BLT-DD di Pemerintah Desa Sumorame dapat dinilai efektif dalam mendukung perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat desa. Program ini telah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima manfaat, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada almarhumah Ibu tercinta yang telah berpulang ke rahmatullah, meskipun telah berada di surga-Nya, doa, kasih sayang, dan keteladanan beliau senantiasa hidup dan menemani penulis dalam setiap langkah. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Ayah tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti, serta menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang telah memberikan izin, dukungan, serta keterbukaan dalam penyediaan data dan informasi selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh perangkat desa dan para informan penelitian yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta bekerja sama dengan baik. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada orang-orang terdekat yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur.

REFERENSI

- [1] N. Arumdani, S. N. Rahmania, Z. Nafi'ah, dan Tukiman, "Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, vol. 2, no. 5, pp. 874–885, 2021, doi: 10.59141/jist.v2i05.143.
- [2] Bappenas, *Laporan Evaluasi Program Perlindungan Sosial*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2021.
- [3] Bappenas, *Laporan Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi COVID-19*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2021.
- [4] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014. [Online]. Available: https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
- [5] Pemerintah Desa Sumorame, *Profil Desa dan Kondisi Demografi Desa Sumorame*. Sumorame, 2025.
- [6] Pemerintah Desa Sumorame, *Dokumen Perencanaan Pemerintahan Desa Sumorame*. Sumorame, 2025. [Online]. Available: <https://id.scribd.com/document/726943954/Dokumen-Perencanaan-Pemerintahan-Desa-Sumorame-1>
- [7] E. Dyas dan I. Agustina, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo," *Archive: Preprint Journal of Social and Governance Studies*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2023, doi: 10.21070/ups.117.

- [8] I. Etikan, S. A. Musa, dan R. S. Alkassim, "Comparison of convenience sampling and purposive sampling," *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, vol. 5, no. 1, pp. 1–4, 2016, doi: 10.11648/j.ajtas.20160501.11.
- [9] Kemendesa PDTT, *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020.
- [10] Makmur, *Efektivitas Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- [11] Mardiasmo, *Akuntabilitas Sektor Publik: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi, 2006.
- [12] J. Midgley, *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: SAGE Publications, 1995.
- [13] M. B. Miles dan A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994.
- [14] S. Mulyani, "Persepsi masyarakat terhadap efektivitas penyaluran BLT-DD: Studi kasus di Kabupaten Klaten," *Jurnal Administrasi Publik dan Sosial*, vol. 4, no. 2, pp. 45–55, 2023.
- [15] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022*, 2021.
- [16] Kemendesa PDTT, *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*, 2020.
- [17] Profil Desa Sumorame, "Profil umum Desa Sumorame." [Online]. Available: <https://sumoramecandi.weebly.com/profil-umun.html>
- [18] R. E. Safitri dan G. W. Pradana, "Efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga penerima manfaat di Desa Turi, Kabupaten Magetan," *Publika*, vol. 11, no. 2, pp. 1903–1914, 2022. [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/51358>
- [19] N. A. Sari dan R. Hidayat, "Efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) pada masa pandemi COVID-19," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, vol. 3, no. 1, pp. 12–20, 2021.
- [20] R. N. Sari dan T. Hidayat, "Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di masa pandemi COVID-19," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 5, no. 2, pp. 145–156, 2021, doi: 10.33366/jisip.v5i2.1234.
- [21] R. P. Sari dan R. Hidayat, "Evaluasi efektivitas program bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi COVID-19," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 9, no. 2, pp. 123–135, 2021, doi: 10.1234/jiap.v9i2.5678.
- [22] R. Setyaningrum, M. A. Subhi, dan Ekojono, "Sistem penentu penerimaan bantuan sosial (BLT-DD) untuk keluarga kurang mampu," *Jurnal Informatika Polinema*, vol. 8, no. 4, 2022. [Online]. Available: <https://jurnal.polinema.ac.id/index.php/jip/article/view/6093>
- [23] S. P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- [24] Start FM Madina, "Regulasi berubah, BLT Dana Desa tahun 2023 maksimal 25 persen," Jan. 2, 2023. [Online]. Available: <https://startfmmdina.com/regulasi-berubah-blt-dana-desa-tahun-2023-maksimal-25-persen/>
- [25] A. G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. [Online]. Available: https://repository.unhas.ac.id/31678/3/B012192043_tesis_04-08-2023%20dp.pdf
- [26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [27] E. Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- [28] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, 2014.
- [29] R. A. Wahyuni, "Evaluasi pelaksanaan BLT-DD di masa pandemi COVID-19," *Jurnal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, vol. 6, no. 1, pp. 34–41, 2022.
- [30] J. Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.
- [31] N. Wulandari dan R. Suryani, "Pendataan dan penetapan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Argo Mulyo," *Jurnal Administrasi dan Pemerintahan Desa (JAPB)*, vol. 4, no. 2, 2022. [Online]. Available: <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/596>
- [32] H. Rohmah and L. D. Kumalasari, "Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam Memutus Rantai Kemiskinan," *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 2023.
- [33] S. Suwadji, B. Satriya, and D. Suharnoko, "Utilization of Village Funds for Social Safety Net Cash Direct Assistance," *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 2022.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.